

ABSTRAK

HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

M. Yusuf Wirawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menunjang dan melengkapi data, penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus berkehendak melalui dua aspek utama, yaitu “penanganan” sampah serta “kewajiban pedagang dan pengelola area”. Penanganan sampah diselenggarakan dalam tiga skala, yaitu kecil, sedang, dan besar. Sementara itu, kewajiban pedagang dan pengelola area mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dalam skala kawasan. Namun, secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara *dassein* (realitas yang ada) dan *dassollen* (kehendak hukum). Kesenjangan ini disebabkan oleh substansi hukum (*legal substance*) yang tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam struktur hukum (*legal structure*) serta budaya hukum (*legal culture*) yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Kata Kunci : Hukum; Rekayasa Sosial; Pengelolaan Sampah

ABSTRACT**LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING IN HOUSEHOLD WASTE
MANAGEMENT IN TANGGAMUS REGENCY****By****M. Yusuf Wirawan**

*This research aims to analyze the function of law as an instrument of social engineering in household waste management in Tanggamus Regency, as well as to evaluate its implementation in practice. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. To support and complement the data, this study also employs interviews and observations. The results of the study indicate that the law in waste management in Tanggamus Regency operates through two main aspects: "waste handling" and "the obligations of traders and area managers." Waste handling is organized on three scales: small, medium, and large. Meanwhile, the obligations of traders and area managers include providing facilities and infrastructure that cover waste sorting, collection, and processing at the area scale. However, empirically, there remains a gap between *das Sein* (the reality) and *das Sollen* (the normative ideal). This gap is caused by the legal substance, which is not aligned with higher-level regulations in the regulatory hierarchy. In addition, issues within the legal structure and legal culture continue to affect the effectiveness of its implementation.*

Keywords: Law; Social Engineering; Waste Management